

**ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DI SELURUH WILAYAH MINAHASA DAN KABUPATEN DI SELURUH
WILAYAH BOLMONG BERBASIS OPINI BPK TAHUN 2018-2022**

*COMPARATIVE ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT
GOVERNMENTS IN ALL MINAHASA REGIONS AND DISTRICTS IN ALL BOLMONG REGIONS
BASED ON BPK OPINION 2018-2022*

Oleh:

**Bayu Agus Wibowo¹
Ivonne Stanley Saerang²
Victoria Neisye Untu³**

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

bayuwibowo03@gmail.com
ivonesaerang@unsrat.ac.id
victorianeisyuntu@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten di seluruh wilayah Minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolang Mongondow Raya yang memperoleh Opini WTP dan Opini Non WTP yang diukur melalui Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Jenis Penelitian ini yaitu Penelitian Komparatif (Perbandingan). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 kabupaten yang ada di Sulawesi utara. Sampel dalam penelitian ini 40 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018-2022 pada 8 kabupaten di provinsi Sulawesi utara. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Analisis Deskriptif dan Uji Beda Rata-Rata dengan metode *Independent Sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dan Non WTP ditinjau dari rasio kemandirian, rasio Ketergantungan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Opini BPK

Abstract: This research aims to determine the Regional Financial Performance of Regency Regional Governments throughout the Minahasa region and regencies throughout the Greater Bolang Mongondow region which obtain WTP Opinions and Non-WTP Opinions as measured by the Independence Ratio, Dependency Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio. This type of research is Comparative Research (Comparison). The population used in this research was 8 districts in North Sulawesi. The sample in this study was 40 regional government financial reports for 2018-2022 in 8 districts in North Sulawesi province. The data analysis method used is the Descriptive Analysis Test and the Average Difference Test using the *Independent Sample t-test* method. The research results show that the financial performance of Regional Governments that receive WTP and Non-WTP opinions is viewed from the independence ratio, the dependency ratio shows significant differences. Meanwhile, if we look at the ratio of effectiveness and efficiency, there is no significant difference.

Keywords: Financial Performance, Financial Ratios, BPK Opinion

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah dan memberikan informasi yang aktual dan faktual terhadap publik. Pada sektor instansi swasta pengelolaan kas dan anggaran adalah bagian penting untuk publik (Rumokoy *et al.*, 2024). Begitu juga dalam sektor instansi pemerintahan anggaran harus disampaikan kepada publik agar publik dapat mengevaluasi yang kemudian didiskusikan untuk bisa melakukan perbaikan kepada kinerja instansi Pemerintahan. Pemerintah daerah melaksanakan pertanggung jawaban kinerja keuangan yang transparan. masyarakat ingin agar supaya pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas tentang kinerjanya.

Untuk itu Kinerja keuangan Pemerintahan daerah diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melaksanakan audit pemeriksaan dan pengawasan serta memberikan opini atas kewajaran yang telah diberikan terhadap laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Merujuk pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang BPK memiliki tugas untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank badan lain yang mengelola Keuangan Negara.

Menurut BPK Opini merupakan pernyataan Profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan yang memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian internal. Terdapat 4 Opini yang diberikan BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan diseluruh wilayah bolaang mongondow. Berikut adalah tabel opini BPK pada 8 kabupaten di wilayah Minahasa dan wilayah Bolaang Mongondow :

Tabel 1. Opini BPK

Pemkab/Pemkot	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Minahasa	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab.Minahasa Utara	WTP	WTP	TW	WTP	WTP
Kab.Minahasa Tenggara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab.Minahasa Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab.Bolaang Mongondow	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kab.Bolaang Mongondow utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab.Bolaang Mongondow timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab.Bolaang Mongondow selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengawas Keuangan

Berdasarkan table opini BPK terhadap 8 kabupaten pada tahun 2018 dan 2019. 7 Kabupaten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan Kabupaten Bolaang mongondow pada tahun 2018 BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dikarenakan adanya pembatasan lingkup pemeriksaan oleh pemerintah daerah sehingga BPK sebagai Auditor tidak mempunyai cukup bukti untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2019 juga kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menurut BPK sistem pengendalian internal sudah memadai namun masih ada kesalahan dalam penyajian material pada Laporan Keuangan. Kemudian pada tahun 7 kabupaten mendapatkan opini WTP dan 1 kabupaten mendapatkan Opini Tidak Wajar (TW) yang menurut BPK opini Tidak Wajar adalah terdapat sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada laporan keuangan menurut BPK laporan keuangan kabupaten Minahasa Utara tidak disajikan dengan wajar sesuai dengan SAP. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap seluruh laporan keuangan kabupaten di seluruh minahasa dan bolaang mongondow.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah se-minahasa dan bolmong raya diukur dari rasio kemandirian
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah se-minahasa dan bolmong raya diukur dari rasio ketergantungan
3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah se-minahasa dan bolmong raya diukur dari rasio efektivitas

4. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah se-minahasa dan bolmong raya diukur dari rasio efisiensi
5. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah se-minahasa dan bolmong raya berdasarkan opini BPK

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Siregar (2015:11) “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. maka bisa disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Halim dan Syam (2012) pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban mencakup seluruh kegiatan dalam satu siklus APBD.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2013:25) Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 dan 3 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Opini Audit BPK

Menurut Undang-undang nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK memiliki tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Windhu (2018), Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu dan mengevaluasi kinerja manajemen maka dilakukan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan, hal ini dikenal sebagai analisis rasio keuangan.

Penelitian Terdahulu

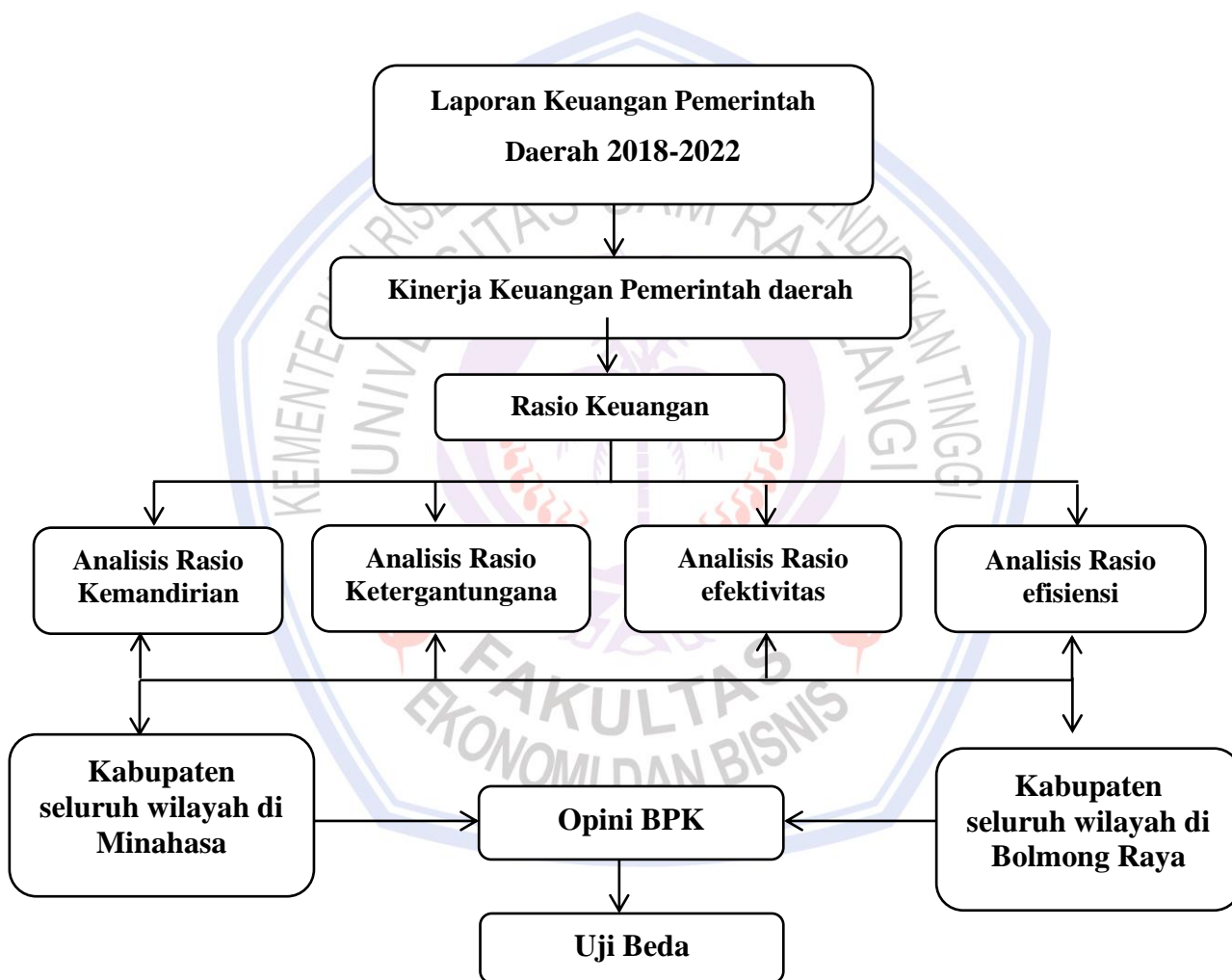
Ratu, Maramis, Rumokoy (2023) Penelitian ini dengan judul ‘analisis komparasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan dan non kepulauan di sulawesi utara’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan di Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Analisis Deskriptif dan Uji Beda Rata-Rata dengan metode *Independent Sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan ditinjau dari rasio ketergantungan dan rasio efektivitas tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Rumondor, Saerang, Maramis (2022) Penelitian dengan judul analisis kinerja keuangan sebelum dan saat pandemic covid-19 pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemic covid-19 pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandara Udara Sam Ratulangi Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan *kinerja keuangan* sebelum dan saat pandemic covid-19 dilihat dari hasil uji *Paired Sampel T-Test*, Sedangkan untuk uji menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks* test hasilnya yaitu tidak terdapat perbedaan sebelum dan saat pandemic covid-19 pada Current Ratio, Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Return On Asset, Return On Investment, dan Jumlah Penumpang. Dan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemic covid-19 pada Debt to total Asset Ratio, Jumlah Barang dan Jumlah Penumpang.

Ngangi, Murni, Untu (2019) Penelitian berjudul ‘analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten sorong selatan’ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan yang dilihat dari aspek belanja dan pendapatan serta menganalisis laporan keuangan periode tahun 2012 sampai 2016 di Kabupaten Sorong Selatan. Hasil penelitian Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ini mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada saat itu telah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan perekonomiannya dari tahun ke tahun.

Model Penelitian



Gambar 2. Model Penelitian
 Sumber: Kajian Teori, 2024

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk komparatif penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sample yang berbeda, atau waktu yang berbeda (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan tingkat kinerja keuangan antara pemerintah daerah kabupaten se-minahasa dan kabupaten se-bolmong raya untuk periode 2018-2022 berbasis opini BPK

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, 2019 merupakan area generalisasi yang di dalamnya terdiri atas objek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu untuk diteliti dan menghasilkan kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Sampel merupakan sebagian dari populasi (Sugiyono, 2019). Jumlah populasi yang besar tidak efisien untuk diteliti, sehingga penggunaan sampel cukup untuk mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini 40 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018-2022 pada 8 kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Metode sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif berupa laporan anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 8 kabupaten di Sulawesi Utara tahun 2018-2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) 8 kabupaten di Sulawesi Utara tahun 2018-2022 data diperoleh dari Portal APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut Suharsoro (2009) dokumentasi adalah rekaman data sekunder berbentuk dokumen, catatan, buku, tulisan, laporan, dan lain sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mengarahkan kepada suatu penggambaran, peringkasan dari suatu objek, fenomena, atau data yang dikumpulkan, dengan penjelasan menggunakan angka, dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Uji Statistik deskriptif merupakan suatu uji yang ringkasan data serta digunakan untuk memprediksi variabel-variabel yang akan diteliti. Uji Statistik deskriptif menggunakan alat analisis rata-rata mean. Dengan uji statistik data dapat dengan mudah dibaca dan digunakan dan dilakukan dengan program SPSS. Analisis Perbandingan merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk membandingkan objek yang berbeda dalam variabel atau instrumen yang sama. Penelitian ini menggunakan alat uji statistik *independent sample test* dalam pengujian hipotesisnya. Alat uji tersebut akan menghasilkan hasil uji berupa nilai Sig. Hipotesis alternatif (H_a) diterima (terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan WDP) apabila nilai Sig < 0,05 dan sebaliknya Hipotesis nol (H_0) diterima (tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan WDP) apabila nilai Sig > 0,05 (Sugiyono, 2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Rasio kemandirian opini Kabupaten WTP memiliki angka mean 3,94% dan Opini Kabupaten Non WTP memiliki angka mean 8,75%. Rasio ketergantungan opini kabupaten WTP memiliki angka mean 90,66% dan opini Kabupaten Non WTP memiliki angka mean 85,80%. Rasio Efektivitas opini Kabupaten WTP memiliki angka mean 97,34% dan Kabupaten Non WTP memiliki angka mean 97,57%. Rasio Efisiensi Kabupaten opini WTP memiliki angka mean 99,99% dan Kabupaten Non WTP memiliki angka mean 101,49%

Tabel 1. Descriptive Statistic Rasio Keuangan Daerah WTP dan Non WTP

Rasio	Kabupaten WTP		Kabupaten Non WTP	
	Mean	Std. Deviation	Mean	Std. Deviation
Kemandirian	3.941333	2.154642	8.750000	2.816491
Ketergantungan	90.662667	3.506641	85.801000	2.227133
Efektivitas	97.340000	5.023947	97.573000	5.097701
Efisiensi	99.998333	3.459154	101.496000	3.535723

Sumber : Hasil Olahan data SPSS, 2024

Pengujian Hipotesis**Tabel 2. Hasil Penelitian *Independent Sample T-Test* Rasio Kemandirian
Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)
kemandirian	Equal variances assumed	3.359	.075	-5.656	38	.000
	Equal variances not assumed			-4.939	12.704	.000

Sumber : Hasil Olahan data SPSS,2024

Berdasarkan table diatas Nilai signifikansi (Sig.) untuk uji Levene's Test lebih besar dari $0,75 > 0,05$. Artinya, kita dapat berasumsi bahwa varians kedua kelompok sama. Pada kolom signifikansi (2-tailed) memperoleh angka $0,00 < 0,05$ yang berarti H1 diterima, Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian kabupaten yang memperoleh opini WTP dan Non WTP di seluruh wilayah Minahasa dan seluruh wilayah Bolaang Mongondow Raya.

**Tabel 3. Hasil Penelitian *Independent Sample T-Test* Rasio Ketergantungan
Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)
Ketergantungan	Equal variances assumed	1.655	.206	4.097	38	.000
	Equal variances not assumed			5.108	24.771	.000

Sumber: Hasil Olahan data SPSS,2024

Berdasarkan table diatas Nilai signifikansi (Sig.) untuk uji Levene's Test lebih besar dari $0,206 > 0,05$. Artinya, kita dapat berasumsi bahwa varians kedua kelompok sama. Pada kolom signifikansi (2-tailed) memperoleh angka $0,00 < 0,05$ yang berarti H2 diterima, Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ketergantungan kabupaten yang memperoleh opini WTP dan Non WTP di seluruh wilayah Minahasa dan seluruh wilayah Bolaang Mongondow Raya.

**Tabel 4. Hasil Penelitian *Independent Sample T-Test* Rasio Efektivitas
Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)
Efektivitas	Equal variances assumed	.083	.775	-.127	38	.900
	Equal variances not assumed			-.126	15.274	.902

Sumber : Hasil Olahan data SPSS,2024

Berdasarkan table diatas Nilai signifikansi (Sig.) untuk uji Levene's Test lebih besar dari $0,775 > 0,05$. Artinya, kita dapat berasumsi bahwa varians kedua kelompok sama. Pada kolom signifikansi (2-tailed) memperoleh angka $0,900$ dan $0,902 > 0,05$ yang berarti H3 ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio efektivitas kabupaten yang memperoleh opini WTP dan Non WTP di seluruh wilayah Minahasa dan seluruh wilayah Bolaang Mongondow Raya.

**Tabel 5. Hasil Penelitian *Independent Sample T-Test* Rasio Efisiensi
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)
Efisiensi	Equal variances assumed	.004	.948	-1.179	38	.246
	Equal variances not assumed			-1.166	15.180	.261

Sumber : Hasil Olahan data SPSS,2024

Berdasarkan table diatas Nilai signifikansi (Sig.) untuk uji Levene's Test lebih besar dari $0,948 > 0,05$. Artinya, kita dapat berasumsi bahwa varians kedua kelompok sama. Pada kolom signifikansi (2-tailed) memperoleh angka $0,261$ dan $0,261 > 0,05$ yang berarti H4 ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio efisiensi kabupaten yang memperoleh opini WTP dan Non WTP di seluruh wilayah Minahasa dan seluruh wilayah Bolaang Mongondow Raya.

Tabel 6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Opini BPK**Levene's Test for Equality of Variances**

		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
analisis_gabungan	Equal variances assumed	.344	.558	-.058	158	.954
	Equal variances not assumed			-.059	69.857	.953

Sumber : Hasil Olahan data SPSS,2024

Berdasarkan table diatas Nilai signifikansi (Sig.) untuk uji Levene's Test lebih besar dari $0,558 > 0,05$. Artinya, kita dapat berasumsi bahwa varians kedua kelompok sama. Pada kolom signifikansi (2-tailed) memperoleh angka $0,954$ dan $0,953 > 0,05$ yang berarti H_0 ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan kabupaten yang memperoleh opini WTP dan Non WTP di seluruh wilayah Minahasa dan seluruh wilayah Bolaang Mongondow Raya.

Pembahasan

Dari Hasil Penelitian diatas menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Rasio Kemandirian Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Non WTP terdapat perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan sejauh mana suatu kabupaten mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. walaupun demikian jika dilihat dari rata-rata rasio kemandirian di seluruh wilayah minahasa dan seluruh wilayah bolmong raya yang mendapatkan opini WTP memiliki angka rata-rata $3,75\%$ dan kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan seluruh wilayah bolmong raya yang mendapatkan opini Non WTP memiliki angka rata-rata $8,75\%$ dikategorikan sangat rendah ($0\%-25\%$).

Dari Hasil Penelitian diatas menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Non WTP terdapat perbedaan yang signifikan. yang mendapatkan opini WTP memiliki angka rata-rata $90,66\%$ dan kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan seluruh wilayah bolmong raya yang mendapatkan opini Non WTP memiliki angka rata-rata $85,80\%$ dikategorikan tinggi ($75\%-100\%$), Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, beberapa kabupaten dengan WTP mungkin memiliki keterbatasan potensi daerah yang membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan PAD.

Dari Hasil Penelitian diatas menunjukkan bahwa Rasio efektivitas Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Rasio Efektivitas Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Non WTP tidak terdapat perbedaan yang signifikan. kabupaten yang mendapatkan opini WTP memiliki angka rata-rata $97,34$ dan kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan seluruh wilayah bolmong raya yang mendapatkan opini Non WTP memiliki angka rata-rata $97,57\%$ dikategorikan efektif ($90\%-100\%$), yang berarti pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah dengan baik.

Dari Hasil Penelitian diatas menunjukkan bahwa Rasio efisiensi Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Rasio Efisiensi Kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan Kabupaten di seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini BPK Non WTP tidak terdapat perbedaan yang signifikan. kabupaten yang mendapatkan opini WTP memiliki angka rata-rata $99,99\%$ dan kabupaten di seluruh wilayah minahasa dan seluruh wilayah bolmong raya yang mendapatkan opini Non WTP memiliki angka rata-rata $101,49\%$ dikategorikan kurang efisien ($90\%-100\%$), yang berarti biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih tinggi, sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah lebih rendah.

Dari Hasil Penelitian diatas menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Berbasis Opini BPK di seluruh wilayah Minahasa dan seluruh wilayah Bolmong Raya yang mendapatkan opini WTP dan non WTP memperoleh hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pada kabupaten yang memperoleh WTP dan non WTP.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil analisis yang telah dilaksanakan dengan judul Komparasi Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Se-Wilayah Minahasa dan Kabupaten Se-Wilayah Bolaang Mongondow dengan berbasis Opini BPK maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Seluruh Wilayah Minahasa dan Seluruh Bolaang mongondow yang memperoleh opini WTP dan daerah Non WTP memiliki perbedaan yang signifikan. Kabupaten non WTP memiliki rasio kemandirian yang lebih tinggi dibanding kabupaten yang memperoleh WTP
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Seluruh Wilayah Minahasa dan Seluruh Bolaang mongondow yang memperoleh opini WTP dan daerah Non WTP memiliki perbedaan yang signifikan. Kabupaten non WTP memiliki rasio ketergantungan yang lebih rendah dibanding kabupaten yang memperoleh WTP
3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Seluruh Wilayah Minahasa dan Seluruh Bolaang mongondow yang memperoleh opini WTP dan daerah Non WTP tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kabupaten WTP dan non WTP memiliki rasio yang cukup tinggi dan masuk dalam kategori efektif.
4. Rasio efisien Keuangan Daerah Kabupaten Seluruh Wilayah Minahasa dan Seluruh Bolaang mongondow yang memperoleh opini WTP dan daerah Non WTP tidak ada perbedaan yang signifikan. Kabupaten WTP dan non WTP memiliki rasio efisiensi yang cukup tinggi dan masuk dalam kategori kurang efisien.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Seluruh Wilayah Minahasa dan Seluruh Bolaang mongondow yang memperoleh opini WTP dan daerah Non WTP tidak ada perbedaan yang signifikan.
6. Opini WTP dan Non WTP hanya merupakan penilaian terhadap *laporan keuangan* pemerintah Opini ini lebih kepada sejauh mana laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan informasi keuangan secara wajar. tidak serta-merta mencerminkan kinerja keseluruhan pemerintahan daerah. Bisa saja suatu daerah memiliki banyak program yang sukses, namun laporan keuangannya tidak disusun dengan baik. Perlu dilaksanakan analisis untuk menyimpulkan bahwa daerah dengan opini WTP lebih baik atau kurang baik dari daerah dengan opini Non WTP.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan diatas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan Non WTP Lakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan prosedur yang telah berjalan baik untuk mengidentifikasi area yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Perkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Tingkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui publikasi laporan keuangan secara berkala dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Dan melaksanakan perbaikan kinerja keuangan daerah seperti melaksanakan pengembangan terhadap PAD. Melakukan pendataan wajib pajak secara berkala, meningkatkan pelayanan pajak, dan menindak tegas penunggak pajak. Mencari sumber-sumber retribusi baru yang potensial dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan retribusi. Melakukan evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan yang didanai dari transfer pusat untuk memastikan efektivitasnya. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis pemerintahan. Bekerja sama dengan akademisi, konsultan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam melaksanakan penelitian lanjutan yang sama untuk dikembangkan sehingga dapat mengetahui kinerja keuangan daerah yang terbaru dan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/39378> Indeks.

Mahsun. Muhamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta

Ngangi, A.I., Murni, S., dan Untu, V.N.. (2018). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan". *Jurnal EMBA*, 6/4. Hal. 4103-4112.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/22227>

Ratu, V. W. E., Maramis, J. B., & Rumokoy, L. J. (2023). Analisis Komperasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 11(3), 1428–1438.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/50143>

Rumokoy, L. J., Liu, B., & Chung, R. (2024). Do board networks matter for corporate cash holdings? Evidence from Australian firms. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CG-05-2023-0216/full/html>

Rumondor., Saerang, I. S., Maramis, J.B. (2023) Pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Sam Ratulangi Manado Analysis Of Financial Performance Before And During The Covid-19 Pandemic In PT Angkasa Pura 1 (Persero) Sam Ratulangi Airport. 10(1), 1535–1544
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/39378>

Siregar, Baldric. (2015). *Akutansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.

Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Windhu, P.(2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: RajaGrafindo Persada.